

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Kabupaten Bandung Barat

Ade Amelia Manalu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Email: adeameliamanalu@gmail.com

Ivan Yudianto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Abstract. *This study aims to see how much influence the government internal control system and human resource competencies have on the effectiveness of regional asset management in West Bandung Regency. The survey in this study was conducted at 40 SKPDs in West Bandung Regency. The research method used in this research is descriptive-verification by distributing questionnaires to each SKPD as many as 40 questionnaires, with the respondents being the administrators of goods in each regional work unit. The data analysis method used is multiple linear regression assisted by SPSS version 29 software. The results of this study indicate that the Government Internal Control System has a positive and significant effect on the effectiveness of regional asset management. Human Resource Competence has no positive and significant effect on the effectiveness of asset management. The Government Internal Control System and Human Resource Competencies simultaneously have a positive and significant effect on the effectiveness of regional asset management. Government Control System and Human Resource Competencies simultaneously on the Effectiveness of Regional Asset Management of West Bandung Regency.*

Keywords: *Government Internal Control System, Human Resource Competencies, Regional Asset Management Effectiveness*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah Kabupaten Bandung Barat. Survei pada penelitian ini dilakukan pada 40 SKPD Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-verifikatif dengan menyebarkan kuesioner ke setiap SKPD sebanyak 40 Kuesioner, dengan respondennya yaitu pengurus barang pada setiap satuan kerja perangkat daerahnya. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda yang dibantu dengan software SPSS version 29. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan aset. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah. Sistem Pengendalian Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah

LATAR BELAKANG

Otonomi daerah bukan menjadi hal yang baru, penerapan otonomi daerah dapat mengubah atau memungkinkan untuk setiap daerah menjadi lebih aktif dalam menjalankan urusan pemerintah. Dalam penerapan otonomi daerah berguna dalam proses pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien guna mencapai visi dan misi setiap daerah.

Dengan adanya pemberian wewenang kepada pemerintah daerah maka pemerintah mengeluarkan undang – undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian dikenal dengan era otonomi daerah, karena adanya perubahan mendasar pada tata pemerintahan dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Sehingga pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian wewenang tersebut sesuai undang undang yang sudah diatur dalam Undang – Undang no.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan pembuatan laporan keuangan, pemerintah daerah harus memiliki pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan sesuai dengan undang – undang, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdayaguna berhasil guna dan bertanggungjawab. Undang – Undang No.15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan menjelaskan bahwa pentingnya sistem pengelolaan keuangan negara yang akuntabel serta membawa pengaruh efektivitas terhadap hasil pengelolaan keuangan negara serta aset negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah dikelola salah satunya yaitu keuangan daerah dikelola secara rapi yang berarti keuangan daerah disusun secara tepat waktu dan tepat guna serta didukung dengan bukti-bukti dan administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mencapai asas umum pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan sistem pengendalian internal dan sumber daya manusia agar pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan efektif.

Pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan karena tujuannya menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tahun 2018 menyatakan tujuan laporan keuangan ialah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan

keuangan dalam pembuatan keputusan laporan ekonomi. Badan Pemeriksaan Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara dalam rangka memberikan pendapat atau opini tentang tingkat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ketentuan terpenuhinya laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah dapat dikatakan sudah berkualitas atau sudah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan salah satunya mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diperiksa oleh BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dalam tugasnya sebagai audit laporan keuangan pemerintah seringkali BPK menemukan temuan masalah yang dapat berujung pada kerugian Negara. Permasalahan itu terdiri dari 28% kelemahan sistem, 29% ketidakpatuhan dan 43% ketidakhematan hingga ketidak efektifan (Sampurna, 2021).

Dalam menyusun laporan keuangan perlunya kompetensi sumber daya manusia keuangan yang baik agar mempengaruhi hasil laporan keuangan yang berkualitas dan efektif agar berefek juga pada pemerintah daerah. Dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerintah keuangan daerah, maka dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Kompetensi ialah kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan (Hutapea et al., 2008).

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang telah diperiksa oleh BPK RI Jawa Barat pada tahun 2011 – 2018 mendapatkan opini BPK yaitu WDP dan pada tahun 2019 mendapat WTP untuk yang pertama kalinya akan tetapi pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali mendapat opini WDP dari BPK. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali mendapat WDP disebabkan oleh lemahnya Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan undang – undang dalam penyusunan laporan keuangan. Pada tahun 2020 juga pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan mengenai penyelesaian administrasi kepegawaian

tepat waktu yang pada tahun 2019 sebesar 113% menjadi 99,64%. Sehingga dapat disimpulkan kompetensi SDM dan kedisiplinan dalam menyelesaikan dan menyajikan laporan keuangan di pemerintahan Bandung Barat harus dapat ditingkatkan lagi dan perlu adanya monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian administrasi.

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan sistem pengendalian intern yang lemah dapat membuat pemerintah daerah kesulitan untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan hasil akhir atas laporan keuangan yang telah dibuat atas hasil kinerja pemerintah daerah dalam satu periode oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Bandung Barat mengalami penurunan kualitas dalam laporan keuangan sehingga BPK RI provinsi Jawa Barat memberi penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2020 (IHPS I) menjelaskan dalam memberikan opini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan permasalahan dalam temuan pemeriksaan yaitu:

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
2. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2020 (IHPS I) menjelaskan terdapat 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan sebesar Rp8,97 triliun, meliputi 6.713 (50%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.702 (49%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp8,28 triliun, serta 152 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp 692,05 miliar.

Pada tahun 2020 opini atas laporan keuangan BPK memberikan kembali opini WDP karena BPK kembali menemukan kelemahan sistem pengendalian intern yakni: (lhp bpk,2021)

1. Kelebihan pembayaran Belanja Modal pada lima paket pekerjaan peningkatan jalan sebesar Rp3.417 .582.485, 11 pada Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
2. Penatausahaan persediaan belum sesuai ketentuan.
3. Akumulasi penyusutan Aset Tetap dan aset lainnya tidak dapat diyakini kewajarannya.

Berdasarkan fenomena tersebut menurut Yadi Azhar, Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (2021) menyatakan pegawai yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah kabupaten Bandung Barat memiliki latar Pendidikan yang berbeda, selain akuntansi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah latar belakang pendidikan yang berbeda mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. Serta masih terdapat pegawai yang kurang kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga masih perlu dibenahi untuk masalah tersebut.

Berdasarkan pernyataan ketua DPC PKB KBB yaitu Asep Dedi mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan kualitas SDM belum berjalan dengan baik di pemerintah kabupaten bandung barat karena masih terdapat beberapa akun yang dilaporkan tidak didukung berdasarkan rinciannya.

Menurut PP RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang penting untuk tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengertian tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersebut dijelaskan lebih rinci dalam peraturan yang sama dimana disebutkan bahwa SPIP terdiri dari 5 (lima) Unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Oleh karena itu, pengendalian internal sangat penting untuk institusi pemerintah daerah. Jika tidak ada pengendalian internalnya baik, sulit untuk menemukan kecurangan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Akibatnya, bukti audit yang diperoleh pemerintah daerah dari data akuntansi tidak akan dapat dipercaya.

Kepala bidang aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Sudiro (2020) mengatakan masalah aset di KBB selalu menjadi kendala bagi pemerintah untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penilaian laporan keuangan daerah dalam 5 tahun terakhir. Pemerintah Bandung Barat masih memiliki ribuan aset yang tidak memiliki sertifikat. Berdasarkan data BPK kabupaten Bandung Barat baru 26 bidang yang sudah memiliki sertifikat dari 1.444 bidang. Masalah pengelolaan aset yang kurang baik menyebabkan laporan keuangan yang disusun tidak

relevan juga. Dibutuhkan pemahaman mengenai sistem pengendalian internal dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang berkompeten juga guna menyelesaikan permasalahan yang sering menjadi temuan BPK pada saat pemeriksaan. Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM yang baik juga akan mendukung pembuatan laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset.

Tabel 1. Permasalahan Aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 2020-2022

No.	Permasalahan Utama
1.	Pada Tahun 2020 dari 1.758 bidang tanah, baru 65 bidang tanah yang sudah disertifikasi (sesuai dengan UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
2.	Tanah seluas 24 ha di Cikalongwetan diduga dijual oleh pihak lain yang diklaim milik pribadi dan tengah disertifikatkan karena tanah tersebut belum dipasang tanda kepemilikan oleh Pemda.
3.	Sengketa pasar panorama dimenangkan oleh ahli waris yang menyebabkan pemda harus membayar ganti rugi sebesar Rp.116.185.000.000. Namun hingga saat ini Pemda KBB masih melakukan peninjauan ulang untuk mempertahankan tanah tersebut sehingga masih tercatat sebagai aset milik Pemda Kabupaten Bandung Barat.
4.	Pengelolaan aset tetap belum memadai (<i>LHP BPK RI No.23B/LHP/XVII.BDG/05/2022</i>)
5.	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas tidak sesuai dengan ketentuan (<i>LHP BPK RI No.23B/LHP/XVII.BDG/05/2022</i>)
6.	Pengelolaan aset belum memadai (<i>LHP BPK RI No.13B/LHP/XVII.BDG/05/2023</i>)
7.	Penggunaan Aset Tanah yang berasal dari penyerahan fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum belum sesuai ketentuan. (<i>LHP BPK RI No.13B/LHP/XVII.BDG/05/2023</i>)
8.	Penyajian Aset tidak berwujud tidak sesuai dengan ketentuan (<i>LHP BPK RI No.13B/LHP/XVII.BDG/05/2023</i>)

Tabel 2. merupakan tabel rangkuman atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2020 – 2022. Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat judul penelitian yaitu: **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat”**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif serta pendekatan deskriptif verifikatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei eksplanasi (*explanatory survey*) yakni penelitian survey yang menggunakan cara untuk menjelaskan hubungan variabel melalui pengujian

hipotesis. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini biasanya berupa kuesioner atau angket (Abdurahman, Muhidin & Somantri, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan metode survei eksplanasi dengan cara menyebarkan angket untuk mengetahui pengaruh dari ketiga variabel mengenai variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1), Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2), variabel Efektivitas Pengelolaan Aset (Y) dan apakah ada pengaruh signifikan dan positif antara sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah Kabupaten Bandung Barat.

Objek dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas pengelolaan aset daerah. Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1) Dan Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) adalah sebagai variabel bebas (*independent variabel*). Sedangkan Variabel Efektivitas Pengelolaan Aset (Y) adalah sebagai variabel terikat (*dependent variable*).

Dalam penelitian ini populasinya adalah Pengurus barang yang terdiri dari 31 Dinas dan Badan serta 16 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Sehingga total populasi pada penelitian ini sebanyak 47 populasi yang terdiri dari pengurus barang dalam setiap SKPDnya. Pengambil sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *sampling jenuh*. Teknik *sampling total/sensus* menurut Sugiyono (2019) adalah Teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Hasil perhitungan data uji normalitas menggunakan *One-sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan *Lilliefors Significance Correction* pada variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X₁) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,064 > 0,05$ dan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Variabel SPIP dan Variabel Kompetensi SDM

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Unstandardized Residual		Unstandardized Residual
N		40		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000		.0000000
	Std. Deviation	5.95455630		6.91491945
Most Extreme Differences	Absolute	.135		.094
	Positive	.125		.081
	Negative	-.135		-.094
Test Statistic		.135		.094
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.064		.200 ^e
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.064		.482
	99% Confidence Interval	Lower Bound		.058
		Upper Bound		.070

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1314643744.
e. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Pengolahan Data (SPSS 29)

Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan varians kelompoknya, maka dilakukan uji homogenitas. Untuk memudahkan proses uji homogenitas peneliti menggunakan bantuan *SPSS (Statistics Product and Service) version 29*. Metode yang digunakan yaitu *Test of Homogeneity of Variances*. Adapun kriteria dalam uji homogenitas yaitu jika nilai signifikansi $\leq 0,050$, maka data tersebut berdistribusi homogen. Sedangkan jika nilai signifikansi $< 0,050$, maka data tersebut tidak berdistribusi homogen.

Uji Homogenitas Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X₁)

Hasil perhitungan data uji homogenitas menggunakan *Homogeneity of Variance Test* pada variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X₁) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,114 > 0,050$. Hasil ini menunjukkan bahwa data variabel X₁ dalam penelitian ini berdistribusi homogen.

Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas Variabel SPIP (X₁)

Tests of Homogeneity of Variances					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
EFEKTIVITAS	Based on Mean	2.023	9	14	.114
	Based on Median	.687	9	14	.710
	Based on Median and with adjusted df	.687	9	3.665	.707
	Based on trimmed mean	1.662	9	14	.190

Sumber: Hasil Pengolahan Data (Spss 29)

Uji Homogenitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₂)

Hasil perhitungan data uji homogenitas menggunakan *Homogeneity of Variance Test* pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₂) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,747 > 0,050$. Hasil ini menunjukkan bahwa data variabel X₁ dalam penelitian ini berdistribusi homogen.

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₂)

Tests of Homogeneity of Variances					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
EFEKTIVITAS	Based on Mean	.536	5	32	.747
	Based on Median	.416	5	32	.834
	Based on Median and with adjusted df	.416	5	24.742	.833
	Based on trimmed mean	.481	5	32	.788

Sumber: Hasil Pengolahan Data (SPSS 29)

Uji Linieritas

Adapun kriteria dalam uji linieritas yaitu jika nilai signifikansi $< 0,050$, maka data tersebut tidak bersifat linier. Sedangkan jika nilai signifikansi $\geq 0,050$, maka data tersebut bersifat linier.

Uji Linieritas Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X₁)

Hasil perhitungan data uji linieritas menggunakan uji regresi kelinieran pada variabel sistem pengendalian internal pemerintahan (X₁) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,973 > 0,050$. Hasil ini menunjukkan bahwa data variabel X₁ dalam penelitian ini bersifat linier.

Uji Linieritas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₂)

Hasil perhitungan data uji linieritas menggunakan uji regresi kelinieran pada variabel kompetensi sumber daya manusia (X₂) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,830 > 0,050$. Hasil ini menunjukkan bahwa data variabel X₁ dalam penelitian ini bersifat linier.

Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis Statistik I

Dalam proses uji hipotesis statistik I, peneliti menggunakan uji t untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X₁) terhadap variabel efektivitas pengelolaan aset daerah (Y).

Tabel 5. Hasil Variabel X₁ terhadap Variabel Y

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-22.130	12.999		
	SPIP	.462	.120	.621	3.838
	K.SDM	.821	.704	.189	1.166

a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS

Sumber: Hasil Pengolahan Data (SPSS 29)

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh nilai t_{hitung} dari variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X_1) terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah (Y) sebesar 3,838 dan t_{tabel} sebesar 1,687. Oleh sebab itu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $3,838 > 1,687$ Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan tingkat signifikansi $<0,05$ ($0,001 < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah”.

Hipotesis Statistik II

Dalam proses uji hipotesis statistik II, peneliti menggunakan uji t untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia (X_2) terhadap variabel efektivitas pengelolaan aset daerah (Y).

Tabel 6. Hasil Uji t Variabel X₂ terhadap Variabel Y

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-22.130	12.999		
	SPIP	.462	.120	.621	3.838
	K.SDM	.821	.704	.189	1.166

a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS

Sumber: Hasil Pengolahan Data (SPSS 29)

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh nilai signifikan dari variabel kompetensi sumber daya manusia (X_2) terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah (Y) sebesar 0,251 $> 0,05$ serta $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,166 < 1,687$). Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah”.

Hipotesis Statistik III

Dalam proses uji hipotesis statistik III, peneliti menggunakan uji F untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X_1) dan kompetensi sumber daya manusia (X_2) terhadap variabel efektivitas pengelolaan aset daerah (Y)

Tabel 7. Hasil Uji F Variabel X_1 dan Variabel X_2 terhadap variabel Y

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1998.616	2	999.308	27.721	<.001 ^b
	Residual	1333.784	37	36.048		
	Total	3332.400	39			

a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS

b. Predictors: (Constant), K.SDM, SPIP

Sumber: Hasil Pengolahan Data (SPSS 29)

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh nilai signifikansi dari variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X_1) dan kompetensi sumber daya manusia (X_2) terhadap variabel efektivitas pengelolaan aset daerah (Y) sebesar 0,001 dan F_{hitung} sebesar 27,721 > 3,252 dengan tingkat signifikan $0,001 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “Sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap variabel efektivitas pengelolaan aset daerah.”

Analisis Regresi Ganda

Tabel 8. Analisis Regresi Ganda Variabel X_1 dan Variabel X_2 terhadap Variabel Y

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-22.130	12.999		-1.702	.097
	SPIP	.462	.120	.621	3.838	<.001
	K.SDM	.821	.704	.189	1.166	.251

a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS

Sumber: Hasil Pengolahan Data (SPSS 29)

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh persamaan regresi ganda untuk hipotesis pengaruh variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X_1) dan kompetensi sumber daya manusia (X_2) terhadap variabel efektivitas pengelolaan aset daerah (Y) ialah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = -22,130 + 0,462X_1 + 0,821X_2$$

Koefisien Korelasi Variabel X₁ dan X₂ terhadap Y

Hasil perhitungan koefisien korelasi antara variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X₁) dan kompetensi sumber daya manusia (X₂) terhadap variabel efektivitas pengelolaan aset daerah (Y), ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 9. Nilai Koefisien Korelasi *Pearson Product Moment*

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.774 ^a	.600	.578	6.004

a. Predictors: (Constant), K.SDM, SPIP

Sumber: Hasil Pengolahan Data (SPSS 29)

Berdasarkan Tabel 9, diperoleh nilai koefisien korelasinya dari variabel sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah yaitu sebesar 0,774.

Koefisien Determinasi Variabel X₁ dan X₂ terhadap Y

Hasil perhitungan koefisien determinasi antara variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X₁) dan kompetensi sumber daya manusia (X₂) terhadap variabel efektivitas pengelolaan aset daerah, ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 10. Koefisien Determinasi Variabel X₁ dan Variabel X₂ terhadap Y

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.774 ^a	.600	.578	6.004

a. Predictors: (Constant), K.SDM, SPIP

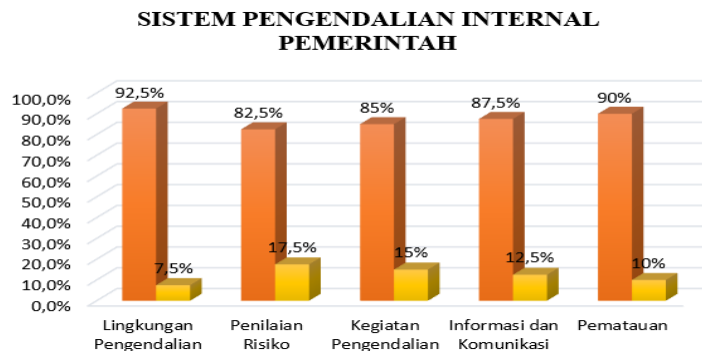
Sumber: Hasil Pengolahan Data (SPSS 29)

Berdasarkan Tabel 10, didapat bahwa besarnya pengaruh variabel sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah adalah sebesar 60% sedangkan 40% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X₁)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh data empirik mengenai sistem pengendalian internal pemerintah berada pada kategori “Optimal”. Hal ini dibuktikan melalui hasil perhitungan persentase frekuensi jawaban kuesioner dari 40 responden sebesar 73,063% dengan kategori “Optimal”. Maka dari itu, hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah perlu ditingkatkan lagi agar dapat sangat optimal sehingga tercapai dengan 100%. Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X₁) memiliki 5 dimensi dalam penelitian ini yaitu Lingkungan Pengendalian Internal Pemerintah, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan.

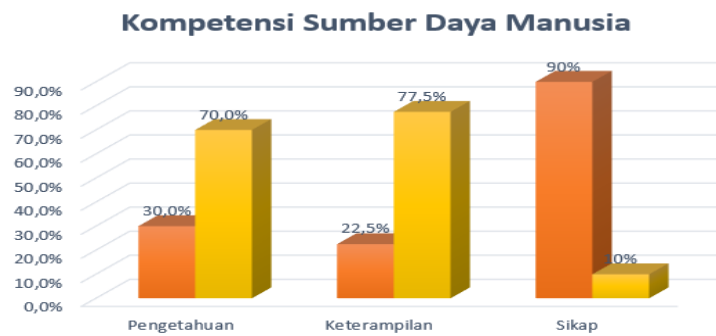


**Gambar 1. Rekapitulasi Perhitungan atas Variabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Gambar 1, memberikan informasi bahwa dari lima dimensi tersebut, yang memiliki persentase tertinggi ialah dimensi lingkungan pengendalian dengan persentase 92,5%.

Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh data empirik mengenai kompetensi sumber daya manusia berada pada kategori “Kompeten”. Hal ini dibuktikan melalui hasil perhitungan persentase frekuensi jawaban kuesioner dari 40 responden sebesar 75% dengan kategori “Kompeten”. Maka dari itu, hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia perlu ditingkatkan lagi agar dapat sangat kompeten sehingga tercapai dengan 100%. Secara empirik hasil perhitungan data menunjukkan persentase skor jawaban responden dari setiap dimensi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Rekapitulasi Perhitungan atas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Gambar 2, memberikan informasi bahwa dari tiga dimensi tersebut, yang memiliki persentase tertinggi ialah dimensi sikap dengan persentase 90%. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna barang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan, indikator yang memiliki persentase terendah yaitu indikator pengetahuan dengan persentase 30%. Berdasarkan hasil lapangan, masih ada kurangnya pemahaman ke beberapa pengurus barang mengenai prosedur, aturan serta teknik dalam mengelola aset sehingga terdapat kendala dalam mengamankan dan memelihara barang milik daerah. Maka dari itu, pengguna barang seharusnya memberi bimbingan pelatihan mengenai prosedur dan aturan dalam mengelola aset daerah. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis variabel kompetensi sumber daya manusia pada daerah kabupaten bandung Barat dipersepsikan pada kategori “kompeten”.

Analisis Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh data empirik mengenai efektivitas pengelolaan aset berada pada kategori “Efektif”. Hal ini dibuktikan melalui hasil perhitungan persentase frekuensi jawaban kuesioner dari 40 responden sebesar 61,84% dengan kategori “Efektif”. Maka dari itu, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan aset perlu ditingkatkan lagi agar dapat sangat efektif sehingga tercapai dengan 100% Secara empirik hasil perhitungan data menunjukkan persentase skor jawaban responden dari setiap dimensi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Rekapitulasi Perhitungan atas Variabel Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah

Gambar 3, memberikan informasi bahwa dari sepuluh dimensi tersebut, yang memiliki persentase tertinggi ialah dimensi pengadaan barang milik daerah dengan persentase 80%. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna barang dalam hal melakukan pengadaan barang milik daerah sudah efektif dan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Sedangkan indikator yang memiliki persentase terendah adalah dimensi pemanfaatan dan penilaian barang milik daerah dengan persentase 37,5%, artinya pengguna barang dalam melakukan pemanfaatan barang milik daerah belum cukup efektif dalam memanfaatkan barang milik daerah serta melakukan pengelola barang dalam melakukan penilaian barang milik daerah sudah efektif dalam memberikan opini atas suatu objek penilaian berupa BMD.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah

Peneliti menggunakan uji statistic dalam menganalisis data penelitian. Setelah dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data, didapatkan hasil bahwa penelitian ini berdistribusi normal, homogen, dan linier., maka melanjutkan pengujian hipotesis dengan statistic parametrik. Pengujian hipotesis dilakukan bertujuan untuk membuat suatu kesimpulan mengenai ada tidaknya pengaruh Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X_1) terhadap variabel Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah (Y). Berdasarkan perhitungan hipotesis dari pengolahan data pada *IBM SPSS version 29*, maka diperoleh hasil sebesar $3,838 > 2,026$, yang memberikan gambaran bahwa daerah penolakan jatuh pada H_0 . Sehingga, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa “Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah”.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah

Dalam pembahasan kelima, peneliti akan menjawab rumusan masalah mengenai “Adakah pengaruh positif dan signifikan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat?”

Peneliti menggunakan uji statistic dalam menganalisis data penelitian. Setelah dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data, didapatkan hasil bahwa penelitian ini berdistribusi normal, homogen, dan linier., maka melanjutkan pengujian hipotesis dengan statistic parametrik. Pengujian hipotesis dilakukan bertujuan untuk membuat suatu kesimpulan mengenai ada tidaknya pengaruh Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) terhadap variabel Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah (Y). Berdasarkan perhitungan hipotesis dari pengolahan data pada *IBM SPSS version 29*, maka diperoleh hasil sebesar $1,166 < 2,026$ dan Tingkat sig sebesar $0,251 > 0,05$ yang memberikan gambaran bahwa daerah penolakan jatuh pada H_1 . Sehingga, H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa “Tidak Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah”.

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah, sehingga H_1 ditolak yang berarti sumber daya manusia belum sepenuhnya memahami dan melakukan pengelolaan aset dengan baik, serta kompetensi yang dimiliki oleh SDM dalam instansi untuk dapat melaksanakan tugas - tugas pekerjaan belum sesuai dengan yang dibebankan oleh organisasi pemerintahan dalam pengelolaan aset daerah maka pengelolaan aset daerah belum efektif. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Priscilia Grace Bay dan Maria Elerina Douk Tunti pada tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah” yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai t_{hitung} sebesar $1,713 < t_{tabel}$ sebesar $2,018$ dan tingkat signifikan sebesar $0,094 > 0,05$.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Kabupaten Bandung Barat yang diukur melalui dimensi lingkungan pengendalian, penafsiran risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berdasarkan persepsi berada pada kategori optimal
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kabupaten Bandung Barat yang diukur dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan berdasarkan persepsi berada pada kategori kompeten
3. Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah pada Kabupaten Bandung Barat yang diukur dengan dimensi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pengusulan pemindahtanganan, pengajuan, pemusnahan dan penghapusan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah berdasarkan persepsi berada pada kategori efektif.
4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah Kabupaten Bandung Barat
5. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah Kabupaten Bandung Barat
6. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah Kabupaten Bandung Barat

DAFTAR REFERENSI

- Abdurahman, M., Muhidin, S. A., & Somantri, A. (2017). *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian* (1st ed.). Pustaka Setia.
- Bay, P. G., & Tunti, M. E. D. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), 138–147.
- BPK. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1–73. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/126455/Permendagri-No-13-Tahun-2006>
- BPK. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Entjaurau, M. A., & Gelatan, L. (2023). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika Email : Stie@stiejb.ac.id*. 7(1), 47–67.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (4th ed.). Jakarta : Salemba Empat.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat : Taushia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008). *Ph.D. Thesis, Central-South University of Technology, China*, 76(3), 61–64.
- Permendagri Nomor 19. (2016). *Permendagri Nomor 19 tahun 2016*. 43.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2), 14–28.
- Sinaga, A. V. (2011). *Analisis pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Studi Kasus Pada Pengelolaan Aset di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)*. Universitas Indonesia.
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (2008). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. (2006). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654*, 1–25.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (2004). *Dpr*, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. (2004). 1, 1–14.

Wiguna, I. M. D. P. D., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., Si, M., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)(Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).

Yusuf, M. (2013). Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. *Jakarta: Salemba Empat*.